

## ABSTRAK

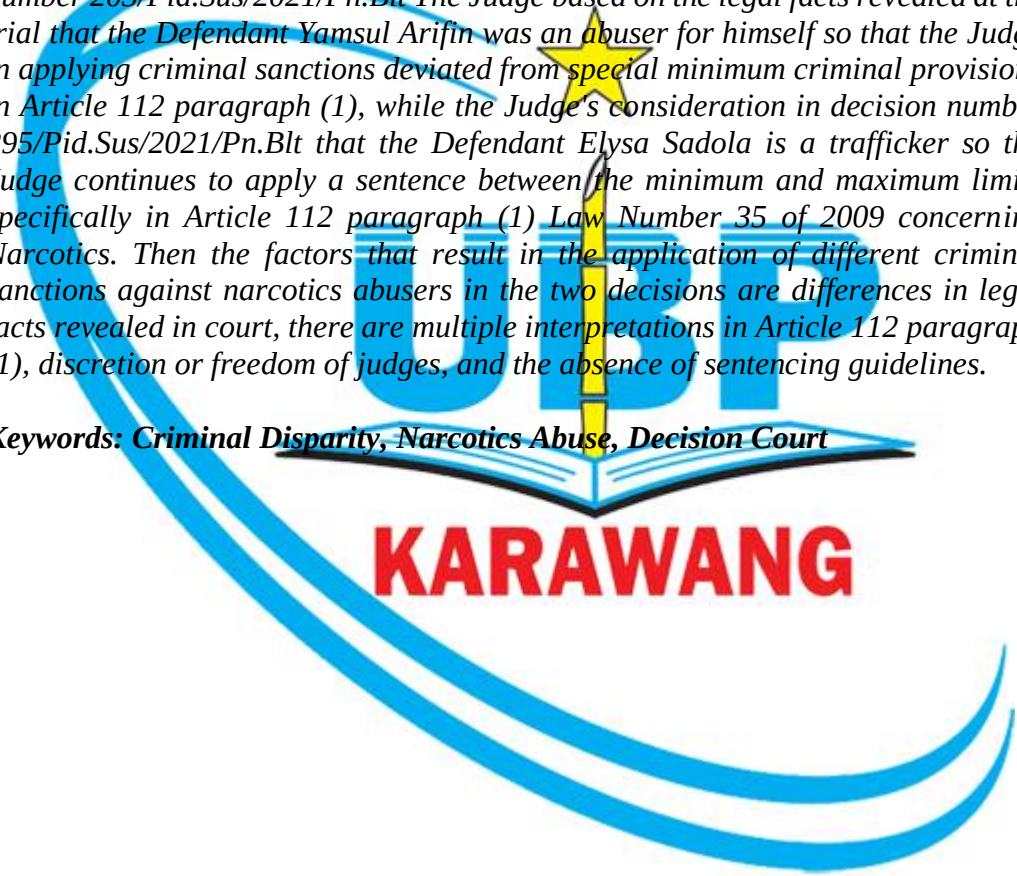
Penerapan sanksi pidana yang berbeda atau disparitas pidana merupakan penerapan pidana dalam hal ini penerapan pidana yang tidak sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna narkoba dalam putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan nomor 295/Pid.Sus/2021/PN.Blt serta apakah faktor-faktor yang mengakibatkan perbedaan dalam penerapan sanksi pidana kedua putusan diatas. Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertimbangan Hakim pada putusan nomor 203/Pid.Sus/ 2021/Pn.Blt Hakim mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Yamsul Arifin adalah penyalah guna bagi dirinya sendiri sehingga Hakim dalam menerapkan sanksi pidana menyimpang dari ketentuan pidana *minimum* khusus dalam pasal 112 ayat (1), sedangkan pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt bahwa Terdakwa Elysa Sadola adalah seorang pengedar sehingga Hakim tetap menerapkan pidana diantara batas *minimum* dan *maksimum* khusus dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian faktor-faktor yang mengakibatkan penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna narkoba dalam kedua putusan tersebut yaitu perbedaan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat multitafsir di dalam pasal 112 ayat (1), diskresi atau kebebasan Hakim, dan tidak adanya pedoman pemidanaan.

**Kata Kunci:** Disparitas Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Pengadilan

## **ABSTRACT**

*The application of different criminal sanctions or criminal disparities is the application of criminal sanctions, in this case the application of criminal sanctions that are not the same or for criminal acts whose dangerous nature can be compared without a clear basis for awarding them. The problem raised in this study is how the Judge considers in applying different criminal sanctions against narcotics abusers in decision number 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt and number 295/Pid.Sus/2021/PN.Blt and what are the factors that result in differences in the application of criminal sanctions to the two decisions above. This study uses a normative juridical approach. The results of this study are the Judge's considerations in decision number 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt The Judge based on the legal facts revealed at the trial that the Defendant Yamsul Arifin was an abuser for himself so that the Judge in applying criminal sanctions deviated from special minimum criminal provisions in Article 112 paragraph (1), while the Judge's consideration in decision number 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt that the Defendant Elysa Sadola is a trafficker so the Judge continues to apply a sentence between the minimum and maximum limits specifically in Article 112 paragraph (1) Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Then the factors that result in the application of different criminal sanctions against narcotics abusers in the two decisions are differences in legal facts revealed in court, there are multiple interpretations in Article 112 paragraph (1), discretion or freedom of judges, and the absence of sentencing guidelines.*

**Keywords:** *Criminal Disparity, Narcotics Abuse, Decision Court*



**KARAWANG**